



# Kekerasan Daring terhadap Perempuan di Ranah Politik: Analisis Wacana Terkait Kandidat Perempuan Partai Buruh pada Pemilu 2024

<sup>1</sup>Alya Eka Khairunnisa, <sup>2</sup>Delia Wildianti

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia

<sup>1</sup>alyaeka02@gmail.com, <sup>2</sup>dwildianti@gmail.com

## Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai ruang. Dalam ranah politik, kekerasan terhadap perempuan memiliki tiga karakteristik khusus, yaitu (1) menyasar perempuan karena gendernya; (2) bentuknya dirancang secara khusus untuk perempuan; dan (3) menghambat partisipasi aktif perempuan di ruang politik (Koalisi Perempuan Indonesia, 2018; Kishi, 2021). Kekerasan tersebut dapat terjadi secara luring maupun daring dengan difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks daring, intensitas dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di ranah politik juga dipengaruhi oleh identitas interseksionalitas korban, seperti ras, agama, kelas sosial, dan sebagainya (Kuperberg, 2018). Hal tersebut dialami oleh perempuan politik dari berbagai negara, termasuk perempuan politik di Indonesia. Pada Pemilu 2024, banyak ditemukan gejala kekerasan daring terhadap perempuan yang menjadi kandidat dalam kontestasi pemilu. Artikel ini menjelaskan fenomena kekerasan daring terhadap perempuan di ranah politik melalui analisis wacana dari sosial media. Secara spesifik, artikel ini berfokus menganalisis wacana perempuan kandidat pemilu dari Partai Buruh yang mayoritas memiliki interseksi identitas sebagai perempuan dari kalangan buruh. Dengan demikian, maka pencegahan dan penanganan kekerasan perlu dilakukan tidak hanya dengan pendekatan praktis, melainkan juga dengan pendekatan ideologis. Integrasi dari kedua pendekatan tersebut melahirkan solusi penanganan kekerasan yang tidak hanya responsif, melainkan juga konstruktif bagi perwujudan kesetaraan politik dalam sistem demokrasi.

**Kata Kunci:** Kekerasan terhadap Perempuan, Pemilu, Daring, Partai Buruh, Praktis, Ideologis.

Di Indonesia, ruang politik dinilai sebagai ruang publik yang sangat maskulin. Penilaian tersebut tidak lepas dari fenomena kekerasan terhadap perempuan di ruang politik, yang dikenal dengan *Violence Against Women in Politics* (VAW-P). Kajian ilmiah tentang fenomena ini telah berkembang pesat. Mulanya, kekerasan terhadap perempuan di ruang politik dilihat hanya dari faktor gender saja (Kuperberg, 2018). Namun, kajian lanjutan menemukan, perempuan-perempuan dengan identitas interseksional tertentu, seperti ras, kelas sosial, etnis, usia, dan/atau orientasi seksual memiliki kerentanan tersendiri untuk menjadi korban kekerasan dalam ruang politik (Kuperberg, 2018; Kishi, 2021; Schneider & Carroll, 2019).



Bentuk kekerasan juga berkembang dari yang semula dilakukan di dunia nyata, kini mulai terjadi di dunia maya (daring). Kekerasan tersebut menyasar perempuan terlepas dari apapun perannya di ruang politik. Dalam konteks Pemilu misalnya, target kekerasan terdiri dari perempuan sebagai peserta pemilu, panitia penyelenggara pemilu, aktivis, pendukung, ataupun sebagai pemilih. Pada perempuan sebagai peserta pemilu, studi Komnas Perempuan (2018) menemukan, bahwa pembunuhan karakter melalui penyerangan bernuansa seksual di media sosial menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh caleg perempuan (Adisya, 2019).

## Kekerasan Daring pada Pemilu 2024: Interseksi Identitas Sosial Caleg Perempuan

Pemilu 2024 diwarnai oleh kehadiran salah satu partai yang baru pertama menjadi partai peserta pemilu, yaitu Partai Buruh. Partai ini memberikan warna baru bagi politik representasi di Indonesia, di mana partai ini mengusung ideologi sosialisme demokratis dengan mengedepankan representasi kelas buruh dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024. Untuk representasi perempuan, Partai Buruh mengusung perempuan dari kelas buruh, seperti perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT), untuk berkontestasi pada pemilu legislatif 2024. Namun, bukan proses yang mudah bagi para caleg perempuan dari Partai Buruh. Mereka mengalami berbagai tantangan, seperti dukungan dari suami karena pertimbangan mengurus keluarga, keterbatasan dana kampanye, larangan sosialisasi dari aparat pemerintah, diragukan kemampuannya karena bekerja sebagai PRT, atau dipandang sebelah mata karena tidak memiliki modal kampanye yang besar (Sumampouw, 2024; Nurcahyo & Carina, 2024; Rahayu dkk., 2024).

Mereka juga menghadapi tantangan secara daring dalam bentuk stereotip, narasi, prasangka, dan cemoohan. Salah satu caleg perempuan dari Partai Buruh yang mengalami tantangan ini adalah Yuni Sri Rahayu, caleg DPRD untuk Dapil DKI Jakarta 7. Yuni sempat mendapat perhatian publik di media sosial sebagai caleg dengan latar belakang PRT. Ada beragam respons atas kehadiran Yuni sebagai caleg, baik yang bersifat positif maupun negatif. Secara umum, Yuni menerima berbagai pujian, afirmasi, dan dukungan terkait pencalonannya sebagai calon legislatif dengan latar belakang buruh. Namun, ditemukan beberapa kekerasan daring yang juga dialaminya. Kekerasan tersebut dapat dilihat dari komentar yang ia terima dalam publikasi-publikasi terkait pencalonannya sebagai caleg DPRD. Komentar tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Bentuk	Wacana di Sosial Media
<b>Stereotyping</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalo miskin udah nyaleg, pas menang nyari proyek (Instagram Narasi TV)</li> <li>Emang ini ART siapa? jangan dengar dari 1 pihak aja. Karena gue berkali-kali sering mendapat ART yang suka fitnah, adu domba, di depan ngomong manis dan pinter ngomong. Padahal semua kebutuhan dikasih, makanan stok frozen banyak, suka gue jajanin gofood. Tetap aja kelakuannya begono (komentar di Instagram @itsindahg dan @yuni_sr14)</li> <li>Memperbaiki ekonomi sendiri (Youtube TribunNews)</li> <li>Kayanya politik kita semudah itu yah, semua bisa jadi caleg. Menurutku, ya kayaknya kita tidak punya standar tertentu layak atau tidaknya di luar standar yang ada saat ini (Instagram Narasi TV)</li> </ul>
<b>Cemoohan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Pede pisan ya, Bu... Ya nawaitu aja Bu, semoga GAGAL</i> (Youtube TribunNews)</li> <li>Alangkah baiknya kalau tidak ada (dana), seharusnya gak nyaleg (Instagram Narasi TV)</li> <li>SMP mencret nak menang (SMP ingin menang) (Youtube TribunNews)</li> <li>Keren, salut. Tapi akan menjadi omong kosong (Instagram Narasi TV)</li> </ul>

Sumber: Diolah penulis dari Instagram dan YouTube

Dari beragam komentar di media sosial (Instagram dan Youtube), ditemukan kekerasan simbolik yang didasarkan pada interseksionalitas identitas sosial perempuan. Yang dialami Yuni dapat disebut sebagai kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang menggunakan gambaran stereotip, narasi, dan prasangka dengan tujuan untuk meragukan dan merendahkan kompetensi perempuan sebagai aktor politik (Krook, 2017). Kekerasan simbolik



menunjukkan bahwa publik menilai caleg perempuan yang datang dari kelas sosial bawah cenderung memiliki motivasi semata-mata untuk menyejahterakan dirinya dan mencari ‘proyek’ untuk keuntungan sendiri. Mereka yang berlatar belakang PRT digeneralisasi memiliki perilaku negatif dan tidak masuk dalam standar kualifikasi seorang caleg.

Selain itu, kekerasan simbolik juga muncul dalam bentuk cemoohan yang erat kaitannya dengan menghina atau merendahkan Yuni karena keberaniannya mencalonkan diri di tengah minimnya dana yang dimiliki. Kekerasan simbolik ini bertransformasi menjadi kekerasan psikologis ketika wacana yang beredar memengaruhi emosi korban dan memberikan dampak trauma atau stres. Yuni mengatakan bahwa dalam proses kampanye, ia sempat mengalami depresi akibat komentar dari publik kepada diri dan keluarganya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa, sebagai caleg perempuan, Yuni rentan mengalami kekerasan yang dipengaruhi oleh identitas kelas sosial.

Pada Pemilu 2024 ini, Yuni belum berhasil mendapatkan kursi DPRD sebagai representasi dari Partai Buruh. Kekerasan simbolik dan psikologis yang dialami Yuni secara tidak langsung turut memengaruhi kegagalannya, meski bukan menjadi satu-satunya faktor yang membuat Yuni tidak terpilih. Membiarkan kekerasan semacam ini terjadi dapat membuat banyak perempuan lainnya khawatir untuk berpartisipasi dalam dunia politik, terutama mereka yang datang bukan hanya sebagai identitas perempuan, melainkan juga identitas lain seperti kelas sosial yang dipandang rendah.

## Bagaimana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Daring dalam Pemilu?

Banyak kasus kekerasan daring terhadap perempuan di ruang politik, termasuk dalam tahapan pemilu. Namun, saat ini, mekanisme pencegahan dan penanganannya masih sangat terbatas. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan kampanye dengan menggunakan kekerasan, namun belum mengatur lebih jauh kekerasan berbasis gender (lihat Pasal 280 ayat 1f UU No. 7 Tahun 2017). Dalam hal penanganan kekerasan seksual, Indonesia telah memiliki payung hukum melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, regulasi ini belum sinkron dengan aturan pemilu dan terbatas pada salah satu bentuk kekerasan saja, yakni kekerasan seksual. Padahal, kekerasan daring terhadap perempuan di ranah politik juga dapat berbentuk kekerasan psikologis, simbolik, fisik, dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan gender perempuan dalam politik yang rentan terhadap penghakiman atas penampilan, aspek moral, dan kemampuan mereka. Strategi pencegahan dan penanganan pada kasus semacam ini perlu ditingkatkan, baik secara struktural, kultural, maupun prosedural.

Secara struktural, penegakkan hukum dan komitmen penyelenggara pemilu perlu termanifestasi dalam protokol penanganan kekerasan berbasis gender yang terintegrasi, sebagai contoh seperti kebijakan *Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género* yang dimiliki oleh Meksiko (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016). Dalam konteks Indonesia, dapat dilakukan adaptasi dengan salah satunya mengadakan satgas khusus penanganan kekerasan daring terhadap perempuan di dalam Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peran organisasi masyarakat sipil juga dapat ditingkatkan, salah satunya melalui pendampingan bagi perempuan korban kekerasan daring dalam ruang politik. Secara kultural, internalisasi nilai-nilai inklusivitas dalam politik perlu dilakukan melalui pendidikan politik dan demokrasi yang bermuatan egalitarianisme. Selain itu, upaya denormalisasi kekerasan pada perempuan di ranah politik baik secara daring maupun luring juga perlu dimasifkan guna menciptakan iklim politik yang lebih inklusif bagi semua gender. Sementara, secara prosedural, partai politik, sebagai ‘rumah’ bagi para kader, juga perlu menjadi institusi yang mendukung perlindungan perempuan dari kekerasan di ruang politik. Secara preventif, partai politik juga dapat membuat buku panduan untuk caleg perempuan dalam menghadapi tantangan kontestasi politik, hingga secara kuratif juga dapat menyediakan kanal pelaporan responsif bagi kader yang menjadi korban kekerasan.

## Daftar Pustaka

### Jurnal dan Buku

- Venny, A., dkk. (2015). *CATAHU 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Krook, M. L. (2017). Violence Against Women in Politics, *Journal of Democracy*, 28(1), 74-88. DOI: 10.1353/jod.2017.0007
- Mustafainah, A., dkk. (2021). *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Salampessy, O.C., dkk. (2023). *Membangun Pemilu Nir-kekerasan Berbasis Gender: Sebuah Panduan Pemantauan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Schneider, P & Carrol, D. (2020). Conceptualizing More Inclusive Elections: Violence Against Women in Elections and Gendered Electoral Violence. *Journal of Policy Studies*, 41, 172–189. DOI: 10.1080/01442872.2019.1694651
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2016). Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [https://www.te.gob.mx/protocolo\\_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf](https://www.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf)

### Website dan Bahan FGD

- Adisya, E. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemilu diakses dari <https://magdalene.co/story/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-pemilu-2/> pada 4 April 2024.
- Rahayu, Harbowo, Basyari. (2024). *Jalan Terjal Caleg Marjinal*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/27/jalan-terjal-caleg-marjinal>.
- Sumampow. (2024). *Kaum Perempuan Partai Buruh Mundur Caleg Karena Dilarang Suami dan Kepikiran Dana Kampanye*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/07/10/kaum-perempuan-partai-buruh-mundur-caleg-karena-dilarang-suami-dan-kepikiran-dana-kampanye>.
- . (2024). *Kalyanamitra Mengemukakan Temuan Kekerasan Berbasis Gender pada Pemilu 2024*, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kalyanamitra-mengemukakan-temuan-kekerasan-berbasis-gender-pada-pemilu-2024>.
- NDI. (2024). *Violence Against Women in Politics (VAW-P) and in Elections (VAW-E)* (Slide powerpoint) disampaikan pada FGD Kalyanamitra pada tanggal 10 Januari 2024.
- KPI. (2024). *Diseminasi Laporan KBGO dalam Konteks Pemilu 2024* (Slide powerpoint) disampaikan pada FGD Koalisi Perempuan Indonesia pada tanggal 01 Agustus 2024.

